BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Besar atau kecilnya pajak yang diterima oleh suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan. Semakin besar jumlah pajak yang diterima oleh negara, maka semakin besar pula kesempatan untuk membenahi pembangunan pada setiap sektornya serta akan semakin cepat terealisasi. Sebaliknya apabila pajak yang diterima oleh suatu negara kecil maka akan membuat perkembangan pembangunan yang berjalan semakin lambat.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar. Sektor pajak merupakan unsur penting dalam penunjang kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, hal utama yang dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia adalah adanya partisipasi rakyat Indonesia sendiri dalam membayar pajak. Penerimaan pajak pada tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan kemandirian pembiayaan negara. Rakyat Indonesia semakin antusias dengan adanya sosialisasi pajak melalui sarana berbagai macam media, membuktikan bahwa terdapat tuntutan besar diimbangi dengan upaya pengumpulan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak.

Pengenaan pajak bukan merupakan jenis pajak baru yang ditambahkan dari yang sudah ada, melainkan sebagai penegasan pelaksanaan ketentuan undang-undang Pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam satu tahun berjalan.

Salah satu jenis pajak yang dikenal yaitu PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Selama melakukan Praktek Kerja Lapangan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang, penulis menemukan adanya pengenaan pajak dengan menggunakan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS). Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) merupakan uang muka dinas yang dipergunakan untuk menanggulangi kebutuhan perusahaan yang tidak terduga/terencana. Pelaksanaan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) lebih pada pengadaan pembelian langsung atas barang, jasa atau sewa tanpa ada proses lelang dan penerbitan dokumen surat pesanan atau surat perjanjian. Maka atas penjelasan tersebut penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul "**PENGENAAN PAJAK PPH PASAL 23 ATAS UANG MUKA DINAS SEMENTARA (UMDS) DI**

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP IV SEMARANG".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang?
2. Bagaimana penyelesaian hutang PPh Pasal 23 atas pembelian barang, jasa atau sewa di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang?
3. Bagaimana pertanggungjawaban/penutupan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) atas pembelian barang, jasa atau sewa di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang?
4. Bagaimana prosedur pengembalian kelebihan atas pembelian barang, jasa atau sewa di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pelaksanaan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang.

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hutang PPh Pasal 23 atas pembelian barang, jasa atau sewa di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IV Semarang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban/penutupan Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) atas pembelian barang, jasa atau sewa di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang.
4. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengembalian kelebihan atas pembelian barang, jasa atau sewa di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang.

1.4 Manfaat Penulisan

Selain adanya tujuan penulisan, terdapat juga beberapa manfaat penulisan. Manfaat dari penulisan ini adalah:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan, khususnya pengenaan pajak atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS). Dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III Jurusan Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.

b. Bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam peningkatan kinerja terhadap pengenaan pajak atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS).

c. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca serta masyarakat luas mengenai perpajakan, khususnya mengenai pengenaan pajak atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS).

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini lebih mudah, maka penulisan laporan ini disajikan secara sistematis dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang penyusunan penulisan yang meliput latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori apa saja yang menjadi dasar atau landasan dalam pembahasan penilitian yang penulis ambil untuk menyusun Tugas Akhir.

BAB III: GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas tentang sejarah berdiri PT. Kereta Api Indonesia (Persero), visi dan misi, penjelasan tentang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang, Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang, Metode Penelitian yang meliputi metode pengumpulan data, metode analisis data dan jenis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang prosedur atas pemberian Uang Muka Dinas Pembiayaan Sementara (UMDS), bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pengenaan pajak atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS), bagaimana pertanggungjawabannya serta bagaimana pengembalian kelebihan atas pembelian jasa sewa di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis.